

## REVITALISASI PRANATA SOSIAL DAN REKONSTRUKSI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG

### *SOCIAL INSTITUTION REVITALIZATION AND RECONSTRUCTION OF MUSRENBANG IMPLEMENTATION*

Peribadi<sup>1</sup>, Megawati Asrul Tawulo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

<sup>2</sup>Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Halu Oleo

Email korespondensi: [citaperibadi@gmail.com](mailto:citaperibadi@gmail.com)

Diterima: 10 Maret 2021; Direvisi: 22 Juni 2021; Disetujui: 23 Juni 2021

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article

under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

**How to cite (APA):** Peribadi & Tawulo, M. A. (2021) Revitalisasi pranata sosial dan rekonstruksi penyelenggaraan Musrenbang. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(2), 212–226.  
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i2.1114>

### **ABSTRACT**

*The study aims to develop a strategic formulation by means of integrating and synthesizing traditional typical planning pattern called Meobu-Obu and Musrenbang (Community consultation on development planning held annually from village level to national level) as participatory development planning occurring so far in the area of South Konawe Regency Government. The attempts of reconstructing and functionalizing rural social institutions were developed through community studies, participatory studies and eclectic case studies. The results show that the process of utilizing Village Funds (VF) still focuses more on physical development aspect rather than the aspect of community socio-economic empowerment. Meanwhile, the process of organizing the Musrenbang tends to be formalistic to merely abort the procedural aspects. Similarly, the institution of kalosara still wrestles with ritualistic field of un sich continuosly, so that the sacralization of kalosara culture has not entered the developmental field yet. It is exactly in this context that the result of research offers a formulation of Musrenbang based on cultural value of kalosara to be used in the future in the attempt of building the rural areas, particularly in the mainland of Southeast Sulawesi Province.*

**Keywords:** social institution, social capital and village fund

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengembangkan sebuah formulasi strategis dengan cara mengintegrasikan serta mensitesiskan antara pola perencanaan khas tradisional yang disebut *Meobu-Obu* dengan Musrenbang sebagai pola perencanaan pembangunan partisipatif yang selama ini berlangsung di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Upaya rekonstruksi dan refungsionalisasi pranata sosial perdesaan tersebut dikembangkan melalui studi komunitas, studi partisipatif dan studi kasus secara eklektik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa (DD) masih terfokus pada upaya pembangunan fisik ketimbang aspek pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Sementara proses penyelenggaraan Musrenbang cenderung berlangsung formalistik untuk sekedar menggugurkan aspek proseduralnya. Demikian pula, pranata *lalosara* masih terus berkutat di ranah ritualistik un sich, sehingga sakralisasi budaya *kalosara* belum masuk ke wilayah pembangunan. Dalam konteks inilah, maka hasil penelitian menawarkan sebuah formulasi Musrenbang berbasis nilai budaya *kalosara* untuk digunakan ke depan dalam rangka membangun wilayah perdesaan serta mensejahterakan masyarakat perdesaan, khususnya bagi mereka yang menempati wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengara.

**Kata kunci:** pranata sosial, modal sosial dan dana desa

---

## PENDAHULUAN

Pengembangan potensi wilayah perdesaan melalui berbagai strategi, terutama pembenahan pertanian modern yang berlandaskan pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), harus bertitik tolak dari upaya revitalisasi kelembagaan dan pranata sosial perdesaan. Betapa tidak, potensi sosial kapital petani kita yang pernah dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat di waktu silam, namun saat ini telah terjadi perubahan sosial budaya dengan berbagai problematikanya. Beragam dampak sosial dan asosial yang mencuat di balik kemajuan dan lompatan yang digapai secara kuantitatif selama modernisasi pembangunan nasional. Hal itu kemudian kian dipe-rparah pada saat revolusi hijau diimplementasikan ke seluruh wilayah nusantara hingga ke pelosok negeri. Ironisnya, polarisasi serta kesenjangan sosial ekonomi mencuat beriringan dengan kian menipisnya lapisan *kohesivitas* masyarakat perdesaan.

Berbagai cetak biru pembangunan wilayah perdesaan yang terus direnovasi, termasuk dalam konteks program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) melalui berbagai jenis bantuan dana pemberdayaan, namun masih terkesan belum memperhatikan serta kurang memperhitungkan urgensi fungsi dan peran pranata sosial dan kelembagaan masyarakat perdesaan. Hal ini kemudian berakibat dan bahkan berujung pada bergesernya keberadaan lembaga adat (*indigeneous institution*) dan implikasinya pada sikap dan tindakan petani yang cenderung kontroversial. Pada akhirnya pula, perilaku orang-orang desa cenderung tidak lagi dipusingkan dengan keberadaan nilai pranata sosial sebagai mutuara kehidupan masyarakat perdesaan di masa lampau. Tentu saja hal ini, adalah bukan saja semata-mata berhasrat untuk mendekonstruksi sistem sosial perdesaan, tetapi juga memberi kesempatan bangkitnya tunas-tunas masa depan yang kelak menunjukkan perilaku pe-

nyimpangan di tengah warga masyarakat perdesaan (Peribadi, 2013).

Urgensi penyelamatan dana pemberdayaan yang telah cukup banyak dikucurkan dari berbagai kalangan untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan sosial ekonomi warga masyarakat perdesaan, tampak signifikan dengan upaya rekonstruksi dan revitalisasi pranata sosial. Karena itu, artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan model penyelenggaraan Musrenbang yang bersumber dari hasil perpaduan antara pola musyawarah kontemporer dengan *Meobu-Obu* sebagai gaya khas perencanaan tradisional yang pernah berlangsung di masa Pemerintahan Kerajaan Konawe dengan menggunakan "Pranata *Kalosara*" yang kini masih tetap disaksikan oleh etnis Tolaki/Mekongga. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan kepada upaya memformulasikan sebuah model penyelenggaraan Musrenbang berbasis nilai budaya *kalosara*, sehingga terlihat proses integrasi antara Musrenbang di tingkat desa dengan Pranata *Okambo* dan *Toono Motuo* yang juga berada di wilayah perdesaan. Demikian pula proses integrasi antara Musrenbang di tingkat kecamatan dengan Pranata *Puutobu* dan *Otobu* yang juga ada di level wilayah kecamatan. Begitu pula proses keterkaitan Musrenbang di tingkat wilayah kabupaten/kota dengan pranata *Lipu* dan *Sapati* serta pranata *Wonua* dan *Mokole* (Peribadi, et. al., 2016; Peribadi, dkk., 2019; Peribadi, dkk., 2021).

Sejumlah pandangan ahli terkemuka menyoal konsep kelembagaan dan organisasi, namun seluruhnya menitikberatkan bahwa kelembagaan dan organisasi berintikan pada objek yang sama sebagai bentuk social form. Sebaliknya, kedua konsep ini berbeda sebagaimana ditegaskan Wiradi (2000) bahwa institusi dan organisasi itu berbeda karena faktor pola-pola kelakuan, norma-norma, fungsi dari tata kelakuan dan kebutuhan apa

saja yang menjadi orientasi pada aspek institusi tersebut. Sedangkan pada aspek organisasi, di dalamnya terkandung unsur seperti struktur umum, struktur kewenangan/kekuasaan, alokasi sumber daya, aspek-aspek solidaritas, hubungan kegiatan dengan tujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Pakpahan (1989) berargumen bahwa kedua konsep ini tidak bisa dipisahkan karena yang satunya disebut institusi berfungsi sebagai perangkat lunak (*software*) dan lainnya yang disebut organisasi berfungsi sebagai perangkap keras (*hardware*) dalam suatu bangunan grup sosial. Hal itu kemudian dipertegas oleh Nataatmadja (dalam Syahyuti, 2002) bahwa kelembagaan dan organisasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab organisasi adalah perangkat keras dan kelembagaan ialah perangkat lunaknya. Pada dasarnya, ketiga pandangan tersebut, terkandung substansi makna yang sama dalam menyoal keberadaan kelembagaan dan organisasi, sehingga kita dapat menangkap kesamaan dan keberbedaan kedua konsep tersebut secara jelimet.

Tanpa menyoal persamaan dan perbedaan konseptual tersebut, maka Poerwanto (2008) menandaskan bahwa kunci utama persaingan produk pertanian Indonesia di masa akan datang adalah perlunya penyempurnaan kelembagaan petani dengan cara melakukan rekayasa sosial, penguatan kelembagaan, dan pendampingan dewan pakar agar dapat terus berkibar kerhidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Pentingnya pemanfaatan segala jenis dana pembangunan desa untuk memberdayakan masyarakat perdesaan serta sekaligus melakukan rekonstruksi pranata dan kelembagaan sosial dan pengembangan potensi sumber daya lainnya yang ada di sebuah wilayah perdesaan. Atas latar pijakan itulah penulisan artikel ini dimaksudkan dalam rangka mengusulkan suatu proses rekonstruksi terhadap pranata sosial per-

desaan, sehingga pengadaan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi warga masyarakat perdesaan yang dananya bersumber dari dana desa serta dana kemanusiaan lainnya dapat terlaksana secara maksimal dan berdampak positif ke depan. Ikhwal ini sangat penting, karena dalam pandangan Collier, dkk., (1996) gegap gempita proyek modernisasi di zaman Orde Baru telah menimbulkan sejuta kekecewaan. Hal itu terjadi, karena sistem kelembagaan egaliter di wilayah perdesaan mengalami pergeseran, sehingga kemudian cenderung tertutup dan pada gilirannya bermuara kepada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.

Sementara itu, sosial kapital tampak terlihat pada semua warga komunitas perdesaan mulai dari Sabang ke Marauke hingga Pulau Miannas ke Pulau Rote. Menurut Lyda Judson Hanifan bahwa betapa berharganya modal sosial bagi warga masyarakat berupa niatan dan kemauan baik, persahabatan, berempati, kejuran dan lain sebagainya. Hal ini kemudian digagas dan diperluas lagi oleh Bourdieu dengan merumuskan modal sosial sebagai sumberdaya yang aktual dan potensial dalam sebuah jaringan dan hubungan kelembagaan yang saling mengenal dan saling mengakui (Putnam, 1995; Fukuyama, 1995; Lawang, 2005; Coleman, 2011; Alfitri, 2011). Dengan demikian, sosial capital adalah bukan hanya nilai dan norma budaya yang semata-mata menjadi universal simbolistik belaka bagi masyarakat pedesaan. Tetapi, juga dapat difungsikan untuk menyelamatkan serta mensukseskan penggunaan dana-dana pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan. Karena itulah, maka harus ada upaya maksimal untuk meningkatkan peran warga perdesaan melalui penguatan pranata dan kelembagaan sosial perdesaan.

Secara harfiah, *Kalo* sebagai social capital adalah dijabarkan dalam beberapa konsep, di antaranya: (1) *mowewei* yang artinya membelitkan; (2) *mombali* yang artinya melingkari; (3) *metaboriri* yang artinya duduk melingkar atau membundar untuk makan bersama; (4) *meobu-obu* berarti duduk secara membundar untuk membicara kepentingan bertsama; (5) *metomusako* yang artinya berdiri berkeliling dalam menangkap ternak, dan dalam melakukan tarian massal; dan (6) *modinggu* yang artinya menumbuk padi secara bersama-sama. Adapun secara fungsional, *Kalo* merupakan ide dalam mayoritas dan sebagai realitas dalam kehidupan Orang Tolaki, pengintegrasikan unsur-unsur kebudayaan Suku Tolaki, adat pokok yang multifungsional, standar hidup terciptanya ketertiban sosial dan moral dan alat untuk mempersatukan pertentangan konseptual dan sosial dalam kebudayaan dan dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki/Mekongga (Tarimana, 1998; Koodoh dkk, 2011; Tamburaka, 2016). Demikian pula, menurut Hakim (2017) bahwa dari sudut pandang pemahaman dan penghayatan yang mendalam, maka dapat dilambangkan bahwa sesungguhnya *kalosara* bermuatan ajaran yang sangat fundamental dalam konteks teologis, kosmologis, antropologis dan sosiologis yang terkait secara integral, interdependen dan timbal balik.

Strategi pembangunan yang seyogyanya harus dikedepankan adalah pembangunan yang berorientasi kepada upaya penguatan kapasitas. Bagi Friedman (1992) kita harus berupaya mengembangkan proses pemberdayaan dalam konteks dimensi kekuasaan atau kekuatan sosial (*social power*), kapasitas politik (*political power/bargaining position*), dan potensi psikologis (*psychological power*). Sejalan dengan itu, Sugandhi (2008) berpendapat pendekatan partisipatoris itu merupakan langkah stra-

tegis untuk meningkatkan kemampuan membangun dan potensi kelembagaan terhadap warga komunitas setempat dengan cara membelajarkan diri secara empirik dengan jalan melibatkan partisipasi warga masyarakat lokal dalam berbagai aspek kehidupan sosialnya.

Akhirnya secara fenomenal, meskipun terlihat perbedaan dari segi pendekatan yang digunakan, namun sesungguhnya teori dan konsep-konsep tentang asas kebudayaan masyarakat terlihat ada kesamaan pandangan, meliputi: (1) komponen kemasyarakatan yang mengandung unsur kebudayaan dan sistem nilai budaya adalah saling terkait secara integral; (2) komponen kebudayaan adalah serentetan kegiatan anak manusia guna pemenuhan segala macam jenis kebutuhannya; (3) integralisasi semua faktor yang ada didukung oleh se rangkaian prinsip yang dinamakan struktur sosial, pola kebudayaan dan sistem simbolistik yang tertuang dalam pada etos dan pandangan hidupnya. Seluruhnya adalah jiwa dan watak yang memberi dorongan untuk terjalinya saling ketergantungan; dan (4) pancara jiwa dan watak dimaksud terkandung di dalam adat, kebiasaan, pikiran, konsepsi, gagasan-gasan, perilaku individu yang hidup bertetangga (Wolf, 1983; Manners dan Kaplan, 2002; Liliweri, 2003).

Intisari budaya inilah yang seharusnya digunakan sebagai landasan dalam menumbuhkan model antisipatif dan kuratif terhadap berbagai problematika sosial yang mengemuka, termasuk dan terutama upaya penyelesaian masalah konflik sosial serta pemantapan pembangunan pertanian dan penggunaan Dana Desa. Karena itulah, maka permasalahan utama yang dikedepankan adalah bagaimana mengintegrasikan antara Musrenbang sebagai perencanaan pembangunan partisipatif dengan pola perencanaan khas tradisional *Meobu-Obu*, sehingga penggunaan dana-dana

pembangunan pedesaan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan dapat berlangsung efektif dan efisien. Atas dasar itu pula, maka upaya revitalisasi atas pranata sosial dan formulasi khas proses penyelenggaraan Musrenbang, merupakan tujuan utama penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Substansi penelitian bersifat eksploratif sebagai upaya menemukan semua faktor dan masalah yang berafinitas dengan program pemanfaatan dana desa serta dana pembangunan lainnya dengan berbagai dinamika sosialnya. Karena itu, obyek kajian didekati dengan pendekatan kualitatif yang berintikan pada studi komunitas dan studi kasus. Ikhwal ini merupakan langkah strategis untuk memahami problematika kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya manusia perdesaan secara *indigenous people*. Dalam konteks studi komunitas, maka menurut Steward (1950) bahwa studi komunitas berintikan pada aspek etnografi, historikal dan komparatif yang harus berlangsung secara eklektik dalam merampungkan serta menganalisis data penelitian.

Upaya proses pengumpulan data di lapangan secara holistik dan konstruktif, maka pendekatan etnografi diutamakan sebagai aspek metodologis dalam rangka merepresentasikan persepsi dan perilaku masyarakat perdesaan sesuai dengan subyektivitasnya sebagai peneliti. Namun demikian, tidak berarti mengabaikan proses pengkajian historikal sebagai upaya mempelajari sejarah kehidupan sosial pada sebuah wilayah perdesaan. Tak terkecuali, pendekatan komparatif juga dapat digunakan sebagai perbandingan antara budaya satu dengan budaya lainnya yang ada di sekitarnya. Adapun upaya mendalami berbagai kasus penyimpangan atau penyalagunaan dana desa selama ini, maka pendekatan kua-

litatif tersebut dilengkapi dengan desain studi kasus. Perspektif ini, bagi Yin (2008) studi kasus merupakan strategi penelitian yang paling tepat digunakan jika pertanyaan diawali dengan permasalahan mengapa sebuah peristiwa sosial mencuat kepermukaan (*deskriptif*) dan bagaimana proses terjadinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya (*eksplanasi*). Disamping itu, studi kasus merupakan bentuk penelitian kualitatif yang memungkinkan dialog (*teori kritis*), interaksi (*konstruktivisme*) yang dapat dipadukan dengan pengungkapan pandangan *emik*, sehingga secara khusus untuk kebenaran empirik inderawi dan empirik rasional dapat digapai melalui proses studi kasus ini.

Studi ini dilakukan di wilayah perdesaan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga semua komponen masyarakat Konawe Selatan yang dinilai layak dan memadai untuk memberikan sejumlah informasi bisa dijadikan sebagai sumber data. Akan tetapi, bagi mereka yang dari kalangan elite masyarakat dan pemerintah desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan, merupakan sumber informasi utama penelitian yang dilakukan dengan proses wawancara bebas dan mendalam. Akhirnya, data yang berhasil dirampungkan dianalisis sejak awal penelitian berlangsung sampai pada proses penelitian berakhir. Adapun teknik analisis data bersifat kualitatif interpretif yang dipertajam dengan cara mengembangkan proses reduksi data, kategorisasi data, pemeriksaan keabsahan data dan hingga pada penafsiran data (Milles dan Huberman 1992; Muhamdijir, 2011; Peribadi, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya refungsionalisasi budaya sebagai bagian dari proses rekonstruksi tergolong sebagai gebrakan sosial yang strategis agar dapat memperoleh jalan keluar terhadap penyelenggaraan pro-

ram pembangunan di era sekarang maupun di masa depan. Tentu saja hal itu memungkinkan tercapai, karena nilai budaya itu sesungguhnya dapat menjadi pendorong dalam bentuk motivasi internal dan eksternal serta bahkan nilai budaya sangat berpengaruh untuk tampil sebagai pendorong dan penggebrak dalam mempercepat pergerakan individu dan pergerakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun secara fenomenal, kini tampak sangat jelas terlihat nilai budaya itu tengah dijangkiti virus dekonstruksi sosial berupa proses degradasi, proses dekulturasasi, proses despiritualisasi, demoralisasi, dehumanisasi, deforestasi, dan berbagai bentuk asosial dan inflasi moral lainnya. Dengan demikian, harus dientaskan kembali dalam sebuah formulasi strategis untuk difungsikan sebagai pilar-pilar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## Musrenbang dan Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktek penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilangsungkan di beberapa daerah Sulawesi Tenggara terkesan hanya formalitas belaka dan hanya sekedar melewati dan melunasi kewajiban proseduralnya. Akibatnya, Musrenbang yang dilaksanakan tersebut mendapat keritikan dan bahkan berupa sanksi sosial dalam bentuk ketidakpercayaan yang kemudian melahirkan tuduhan hanya sekedar menghambur-hamburkan “uang rakyat”. Dengan demikian, berarti perlu dorongan peningkatan antusiasme kemauan politik (*political will*) untuk menerapkan UU No. 25 Tahun 2004 sebagai payung hukum penyelenggaraan Musrenbang dengan berlandaskan pada kecerdasan inteleksi (intelektual spiritual) dari kaum elite yang diamanahi tugas peran kelembagaan pemerintahan.

Secara empirik, adalah tidak hanya belum dapat disebut representatif, tetapi juga seringkali warga masyarakat cenderung menjadi objek yang dianggap tidak memahami atau tidak menguasai perkara dan permasalahan di lingkungan sosialnya. Padahal sebetulnya warga masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, bahkan menguasai seluruh keadaan di wilayahnya. Karena itu, adalah sangat tidak beralasan jika masyarakat sebagai warga yang dilahirkan dan dibesarkan di kampung itu, tidak dilibatkan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembangunan lingkungan desanya secara keseluruhan. Dalam konteks ini, orang-orang yang datang atau didatangkan dari luar untuk membantu jalannya program pembangunan perdesaan berserta program pemberdayaannya, seyogyanya berperan sebagai pembelajar atau membelajarkan diri dari orang-orang yang dituakan oleh masyarakat setempat.

Ketika kita berpijak pada riset pembebasan, maka secara metodologis dapat disebutkan bahwa selain kita harus mulai membebaskan perspektif kajian dari otorianisme kaum positivisme, modernisme dan strukturalisme dalam sebuah prinsip "*to learn about the people*" menuju kepada belajar dari warga (*to learn from the people*). Maka kita pun harus mulai merngedepankan metodologi kritis, konstruktivisme, partisipatoris dan profetik, sehingga program pembangunan wilayah perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa dapat berlangsung secara *button up* atau tidak lagi secara *top down* itu, terutama dalam proses penyelenggaraan Musrenbang. Artinya, dalam rangka menumbuh-kembangkan program pemberdayaan di seluruh lapisan masyarakat, baik itu di perkotaan dan maupun di wilayah pedesaan, maka sudah saatnya kita meninggalkan, menanggalkan dan melepaskan paradigma metodologi konvensional.

Hasil penelitian menemukan dan menunjukkan serta menampilkan gambaran suram atas proses penyelenggaraan Musrenbang dan implementasinya di daerah Pemerintahan wilayah Sultra, yang secara lebih spesifik menggeliat di daerah Kabupaten Konawe Selatan. Perihal itu nampak terang benderang yang bermula dari tahapan proses sosialisasi, proses akomodasi aspirasi di tingkatan yang sangat dasar, proses interaktif dalam forum, kesinambungan usulan program warga pada tiap tingkatan Musrenbang, sampai pada realisasi program yang diimplementasikan. Bagaimana hasilnya dan apa manfaatnya bagi wilayah perdesaan dan para penghuninya ? Betapa suara warga masyarakat terdengar begitu nyaring menuding bahwa "Musrenbang adalah tidak lebih dari kegiatan seremonial belaka".

Betapa tidak, sebagian besar waktu penerapan Musrenbang dipenuhi dengan sambutan-sambutan pejabat. Mulai dari kelas sosial paling tinggi setingkat Bappeda, Anggota Dewan, Camat, hingga pada Lurah. Demikian pula modul yang mengemuka dalam penyelenggaraan Musrenbang tersebut adalah tak ubahnya "kaset yang diputar ulang dan terus berulang". Karena pada dasarnya perihal itu telah diinformasikan dalam sambutan pada acara-acara lain yang terkesan "bernada kampanye politik". Sedangkan pembicaraan tentang kepentingan vital untuk warga masyarakat itu sendiri, terdengar sekilas disinggung pada akhir pembicaraan. Ironisnya, para aparat lebih mendominasi forum dan lebih banyak melontarkan pembicaraan serta menawarkan usulan program. Padahal belum pasti seluruh aparat pemerintah tersebut sudah merasapi isak tangis dan jeritan hati masyarakat dengan berbagai suka dukanya sehari-hari. Terlebih lagi, bila aparat itu tampil bersikap dan berperilaku selaku "turis-turis pembangunan" yang

hanya datang di lapangan dengan santai dan penuh canda sebagaimana pernah disentil oleh Chambers.

Secara empirik, mereka sebagai aparatur tidak pernah bergelut seperti mereka yang selama ini berjibaku sebagai sukarelawan P2KP serta PNPM MP yang betul-betul menguasai permasalahan di lokasi itu. Adapun masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Musrenbang, tampak lebih dominan berasal dari orang-orang yang tidak kritis dan disenangi oleh Pemerintah Kelurahan. Tak pelak lagi, dari pihak kaum wanita dan kalangan muda serta segenap kelompok sosial ekonomi masih cenderung terpasung dan terabaikan. Hal itu pun terjadi pada warga yang terbilang kritis di kampungnya, mereka tidak diundang untuk menghadiri Musrenbang. Akibatnya, hasil riset menandaskan bahwa dana desa belum bisa memenuhi harapan dan kebutuhan vital masyarakat pedesaan, karena proses penggunaan Dana desa masih lebih dominan secara fisikal bila dibandingkan dengan program pemberdayaan sosial ekonomi.

### Diskursus Musrenbang Berbasis Budaya Kalosara

Sikap dan perilaku individu serta tindakan sosial yang menunjukkan gaya khas kongkalingkong atas fungsionalisasi dana-dana kemanusiaan yang terkesan masif dan santer serta bahkan kedengarannya cukup menggemparkan selama kurun waktu dikucurkannya dana-dana program pemberdayaan di tengah masyarakat perdesaan. Maka peristiwa fenomenal dan faktual empirik tersebut mendorong untuk segera menyelenggarakan revolusi mental sebagaimana yang telah dihembuskan oleh Presiden Jokowi. Meskipun implementasi program Revolusi Mental masih dianggap sebatas wacana yang belum jelas jantrungnya. Akan tetapi, program ini tampak relevan dikedepankan di tengah fenomena

hiperrealitas yang membingungkan dan mencemaskan atas penyelamatan dana-dana pembangunan dan dana-dana kemanusiaan lainnya.

Tak pelak lagi, ketika tawaran dan usulan program revolusi mental ini ditopang oleh kerangka “Cultural Weberian” dan spiritual Khaldunian melalui proses sintetis yang integral dan interdependen. Pertama, tesis Cultural Weberian merupakan grand theory atas bangkitnya kapitalisme di Amerika dan di Eropa yang didasari oleh “Etika Calvinis Protestan” sebagai kekuatan penggerak (*driving force*) dalam menumbuhkembangkan kehidupan sosial ekonomi. Hal ini kemudian ditemukan dan dikembangkan oleh Robert Bellah pada nilai budaya bangsa Jepang dan China. Menurutnya, bangkitnya peradaban Jepang dan China menjadi negara yang berkekuatan ekonomi raksasa, adalah didasari dan dilandasi oleh nilai budaya Shinto dan Konfuchu. Kajian yang sama juga ternyata ditemukan dan dideskripsikan oleh Geertz sebagai antropolog Amerika yang ditugaskan oleh kolonial Belanda untuk mempelajari budaya Jawa. Pada gilirannya, pengaruh nilai budaya atas revolusi peradaban tersebut dikategorikan sebagai Teori Budaya dalam perspektif teori dan konsep-konsep modernisasi.

Upaya melengkapi dan sekaligus memperkaya perspektif teori budaya dimaksud, maka penulis mencoba membandingkan antara perspektif Cultural Weberian dan perspektif Spiritual Khaldunian sebagai variabel internal yang sama-sama berpengaruh atau sama-sama sebagai kekuatan penggerak terhadap kebangkitan sebuah peradaban yang gegap gempita. Jika ontologi tesis Weber, Bellah dan Geertz diangkat dan dikembangkan dari budaya calvinis, shinto dan konfuchu, maka ontologi kajian Ibnu Khaldun didevelop dari nilai Rukun Iman dan Rukun Islam yang telah dihayati dan

diamalkan secara istiqamah oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, termasuk beberapa di antaranya yang tampil menjadi konglomerat di Jazirah Arab ketika itu. Para sahabat Rasul tersebut tampil prima dengan prinsip spiritual yang menunjukkan etos kerja “berani kaya dan berani taqwa”. Karena itu, adalah tidak mengherankan jika sahabat Rasul yang kaya raya itu menunjukkan sikap kedemawanan sosial yang begitu tinggi dengan penuh ketaatan dan keikhlasan untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sadaqah sebagai upaya membangun negara serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi para penghuniya. Pada gilirannya terdengarlah berita yang seolah menjadi sebuah anekdot bahwa hasil pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, ternyata kembali ke Baitul Maal karena tidak ada lagi orang yang kategori miskin yang mau menerima pemberian zakat itu. Hal itu pun terjadi di zaman kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis sebagai turunan dari Umar Bin Abdul Khattab.

Betapa menakjubkan, jika kedua perspektif teori nilai budaya dan religiositas ini disintetiskan sehingga dapat menjadi landasan teoritis bagi Pemerintahan Jokowi dan pemerintahan-pemerintahan negara lain dalam mengedepankan program Revolusi Mental. Namun secara khusus dalam penelitian dan penerangan artikel ini yang dikaji di wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka rekonstruksi dan reformulasi penyelenggaraan Musrenbang berbasis kultural adalah didevelop dari nilai dan norma *kalosara* yang masih diyakini kesakralannya oleh etnis Tolaki/Mekongga. Betapa diyakininya, sehingga terkesan seperti sakralisasi Al Quran bagi umat Islam yang menghayati dan mengamalkannya sehari-hari. Artinya, sangat penting dilakukan penyuntikan kekuatan nilai budaya ke dalam ranah pem-

bangunan daerah serta desain formulasi Musrenbang, sehingga Musrenbang dapat berlangsung sesuai dengan hasil rancangan basis budaya *Kalosara*.

Kalau tidak dapat diikuti sepenuhnya sebagaimana hasil rancangan dimaksud, maka Paling tidak, nilai budaya *Kalosara* yang masih sakral ini dapat menjadi *selef control* dan *social control*. Tak pelak lagi, dalam konteks fungionalisasi dana pembangunan, terutama dana desa yang selama ini cenderung disalahgunakan dan diselewengkan sebagaimana dana kemanusiaan Bansos yang tengah diporak-porandakan oleh kaum politisi rezim kini, Karena itu, besar harapan agar proses penyelenggaraan Musrenbang yang dilandasi oleh ritual adat *Kalosara*, dapat menjadi resep jitu untuk mengantisipasi berbagai perilaku serong di dalam menyelesaikan sebuah program pembangunan

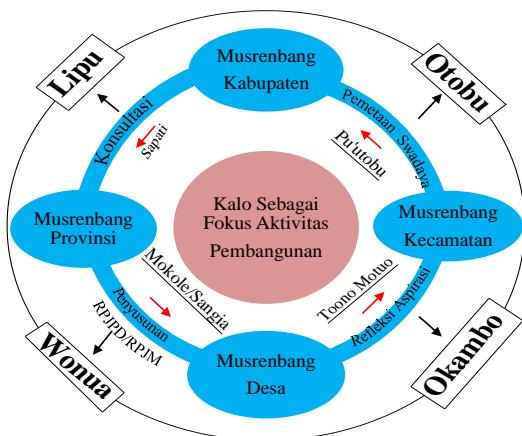
Upaya perumusan strategis antara Musrenbang selaku demokrasi deliberatif yang perencanaannya berintikan pada paradigma pembangunan partisipatif modern telah dipadukan dengan *Meobu-Obu* sebagai strategi perencanaan konvensional yang melembaga di dalam pranata sosial *Onapo/Okambo* di bawah kendali oleh *Toono Motua* sebagai seorang yang dituakan. Demikian halnya, di tingkat kecamatan (*Otobu*) dipandu oleh *Puu' tobu*, serta di tingkat Kabupaten oleh *Sapati* dan *Mokole* ataupun *Sangia* di tingkat Provinsi, sehingga proses penyelenggaraan Musrenbang dapat berlangsung sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat. Karena itu, bertolak dari prinsip “Kultural Weberian” dan Spiritual Khaldunian, maka besar harapan agar upaya penyuntikan kekuatan nilai budaya *kalosara* ke dalam pelaksanaan acara Musrenbang dapat membawa proses pertemuan dan pembicaraan serta perdebatan yang reasional, indah, damai, kondusif dan humanis rasional sebagaimana dikehendaki oleh

Habermas sebagai penganut teori kritis dari kalangan Mashaf Frankfurt. Selain itu, juga besar harapan agar mampu menggerakkan dan membangkitkan kesadaran spiritualitas untuk memfungsikan simaksimalkan dana desa secara efektif, jujur dan adil. Maka pada akhirnya, musyawarah untuk merencanakan berbagai program yang mendesak dan urgent adalah tidak lagi berlangsung secara rutinitas belaka dalam bentuk seremonial dan transaksional yang hanya menepiskan proses regulasinya. Akan tetapi, benar-benar dapat menjadi forum penampungan aspirasi yang obyektif dan representatif serta konsisten.

*Meobu-obu* sebagai pola perencanaan partisipatif konvensional yang pernah diimplementasikan di masa lalu di wilayah Pemerintahan Kerajaan Konawe, adalah berlangsung dalam bentuk duduk membundar dengan maksud membicarakan dan memusyawarakan secara mendalam demi menggapai suasana kehidupan yang mensejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan Musrenbang yang berlangsung di tingkat pranata *Otobu*, maka dikembangkan strategi Pemetaan Swadaya untuk menemukan berbagai informasi yang berkembang ketika refleksi pemikiran dikedepankan sesuai dengan data dan fakta yang ada. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mendalami secara kritis atas informasi dan fakta yang sudah ditemukan, sehingga setiap informasi yang mengemuka harus langsung dianalisis. Disamping itu, juga dapat mendalami hubungan timbali balik dengan merumuskan sebuah pohon masalah seperti yang dilakukan sewaktu refleksi diselenggarakan, sehingga upaya refleksi pemikiran tidak hanya berlangsung di siklus awal, tetapi terus berlangsung di berbagai ruang siklus, terutama pada saat pemetaan swadaya. Adapun ketika menyampaikan diskursus Musrenbang di tingkat pranata *Sapati*, maka yang dikem-

bangkan adalah melakukan konsultasi secara mendalam dalam rangka pembentukan lembaga Swadaya Masyarakat. Artinya, kita akan berhimpun secara sukarela dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya, adalah bukan berkumpul atau berorganisasi dengan cara terpaksa dan apalagi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Dalam konteks inilah, maka kita mulai berupaya menumbuhkan jiwa kemandirian serta semangat bekerjasama dalam kemitraan untuk memperjuangkan yang ingin dicapai bersama. Sedangkan di tingkat pranata *Mokole*, maka akan disempurnakan dengan menyusun PJP, PJM dan PJP.

Peralihah teori perencanaan dari pola instrumental rasionalitas ke strategi komunikasi rasional, maka sudah saatnya kearifan lokal seperti nilai budaya *kalosara* harus mulai dilibatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Karena teori perencanaan sebagai perspektif khusus yang telah mengiringi perlibatan masyarakat dalam perencanaan melalui konsep dan praktek yang di antaranya disebut *advocacy planning, transactive, pluralism, communicative, collaborative*, dan lain-lain (Peribadi, dkk., 2019). Maka berarti secara langsung dan tidak langsung serta suka atau tidak suka, *local wisdom* dan *local knowledge* lainnya harus disertakan secara partisipatif dan konstruktif. Karena itu, Secara visual, diskursus Perencanaan Participatory berbasis *kalosara* yang secara praktikal disebut Musrenbang telah dilegitimasi oleh sang ahli dari kalangan akademisi, kaum politisi dan pihak bangsawan Tolaki seperti tercantum pada gambar 1.



Gambar 1.

Desain Formulasi Perencanaan Participatory (Musrenbang) berbasis Pranata Sosial *Kalosara* pada Masyarakat Tolaki/Mekongga.

### Proses Verifikasi dan Validasi

Penjelasan dalam sub ulasan ini, penulis hanya menuangkan 5 (lima) pemikiran representatif yang kategori sebagai informan dari sebanyak 33 orang validator ahli yang sudah menverifikasi serta memvalidasi hasil perumusan Musrenbang berbasis *kalosara*. **Pertama**, bagi seseorang tokoh adat serta mantan birokrat yang kini familiar dengan panggilan budayawan Sulawesi Tenggara serta terus menulis seputar permasalahan adat istiadat Tolaki, memberi pandangan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Menurutnya bahwa:

“Pas sekali jika kandungan makna *kalosara* dipadukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan, supaya cara urun rembuk orang-orang tua kita di masa lalu dapat dientaskan kembali dan sekaligus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dewasa ini sebagai generasi mudanya, sehingga kaum milenial bisa juga memahami arti pentingnya nilai budaya kita. Tentu saja demikian, karena selain metode alamiah seperti ini bisa dikemas menjadi ilmiah, juga sebetulnya mengandung nilai spiritual yang membuat aktor-aktor pembangunan takut untuk melakukan penyimpangan. Tidak hanya itu, kalau acara musyawarah pembangunan saat ini dihadiri

oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai orang yang dituakan, maka selain mereka mampu membahasakan aspiratif masyarakat diwakilinya, juga kehadiran mereka sudah pasti diapresiasi oleh para pejabat dari berbagai tingkatan. Karena itu, benar-benar saya mengapresiasi rancangan tersebut dan ini dapat dikatakan sebagai penghargaan dari orang luar daerah selaku kerabat kita yang bukan orang Tolaki” (Basaula Tamburaka, wawancara 28 Juli 2018).

**Kedua**, seseorang putra Kolaka Timur yang berpendidikan tinggi dengan gelar doktor yang saat ini menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Halu Oleo Kendari menjawab pertanyaan penulis bahwa:

“Pada dasarnya, media komunikasi budaya menjadi sangat penting untuk diangkat kembali ke permukaan, sehingga serbuan dari dampak revolusi komunikasi digital dengan berbagai aksesornya yang menghipnotis kawula tua dan kawula muda saat ini, dapat disaring dan dieliminir secara akurat. Karena itu media komunikasi budaya seperti pranata *kalosara* adalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filterisasi, tetapi juga dapat difungsikan sebagai instrumen musyawarah dalam merencanakan berbagai program pembangunan. Jadi tepatlah kalau Pak Peribadi berinisiatif untuk mengintegrasikan model perencanaan konvensional dengan model perfencanaan modern, karena di dalamnya masing-masing ada kelebihan yang bisa ditemukan. Dan yang takkalah pentingnya lagi bahwa nilai budaya yang mengandung kearifan lokal dapat mengerem aktor-aktor pembangunan sehingga enggan menyalahgunakan dana pembangunan itu. Kesimpulannya, *kalosara* dapat dijadikan salah satu instrumen yang dapat menyatukan anggapan dari bermacam-macam kepentingan (Kelompok warga, eksekutif dan legislatif) serta dapat menciptakan ruang matriks yang bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan itu. Itulah sebutulnya yang

merupakan substansi dari konsep *mepo-koaso meronga ronga ato wangu i wonuando* yang berarti bersatu padu kita membangun kampung serta wilayah kita” (Doktor Ambo Wanua Nusantara, wawancara 1 Juli 2019).

**Ketiga**, seseorang akademisi UHO dan putra Tolaki jebolan *University of Guelph Canada serta The University of Queensland Australia* menjawab pertanyaan penulis ketika berlangsung proses wawancara. Baginya bahwa:

“Rancangan formulasi seperti ini sudah sangat tepat untuk digunakan di wilayah daratan jazirah Sulawesi Tenggara, karena *kalosara* sangat sakral bagi orang Tolaki dan Mekongga yang mayoritas penghuninya. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan daerah lain dan apalagi kalau pada tataran atau tingkatan nasional yang model penyelenggaraan musrenbangnya secara keseluruhan khan sudah paten dan seragam. Namun demikian, untuk mempertimbangkan budaya lokal masing-masing, maka cocok sekalim jika Musrenbang diintegrasikan dengan pranata *kalosara* di daerah ini. Maka selain penghayatan nilai budaya bisa membuat aktor-aktor pembangunan terkendali perilakunya oleh sakralisasi nilai budaya, sehingga mungkin pada gilirannya dapat menumbuhkan kejujuran dalam melakukan pembangunan, maka juga kita dapat memanfaatkan *kalosara* sebagai media komunikasi budaya, terutama di wilayah yang mayoritas orang Tolaki/Mekongga atau sebagai penduduk lokal. Tetapi untuk hal ini, maka saya sarankan agar modelnya berbentuk hirarkis saja atau bukan berupa bulatan siklus” (Profesor. Asrul Sani, Meter. Sc, Ph. D., wawancara 1 Juli 2019).

**Keempat**, seseorang generasi bangsawan dari Mowila Kabupaten Konawe Selatan yang saat ini berkedudukan selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Beliau adalah alumni sosiologi FISIP Universitas Halu

Oleo menuturkan pandangannya ketika wawancara sedang berlangsung. Menurutnya bahwa:

“Sebetulnya, perihal apa saja yang berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kehidupan sosial di kalangan masyarakat Tolaki/Mekongga, terutama kaitannya dengan masalah pertentangan, pertengkar dan perkelahian yang biasa disorot oleh teori konflik dalam sosiologi, maka menurut hemat saya bahwa selain nilai budaya *kalosara* dapat difungsikan sebagai media sosial pembangunan, juga lebih ampuh dan tepat atau lebih strategis untuk digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial yang setiap saat terjadi. Apalagi dalam forum Musrenbang yang juga biasa terjadi perbedaan pandangan atas program mana yang harus lebih diutamakan dan dikedepankan, maka kehadiran tokoh adat dapat dengan mudah mendinginkan perdebatan itu melalui sebuah ritual dengan ritual *mosehe*. Dengan cara itu, maka Insya Allah tidak ada lagi sehelai benang kusut yang tersimpan, karena dalam ritual *mosehe* itulah semuanya bersifat saling memaafkan” (Irham Kalenggo, wawancara 20 Juni 2019).

**Kelima**, dalam pandangan salah seorang putra Konawe Selatan dan juga sebagai staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo serta mantan pejabat di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara betutur pada saat wawancara berlangsung bahwa:

“Hasil desain pak Peribadi tentang Musrenbang berdasarkan nilai *kalosara* ini, adalah sudah sangat cocok dan relevan dengan penyelenggaraan di berbagai tingkatan pemerintahan dan bahkan sesuai dengan roh Permendagri. Makanya, saya menyatakan sejurnya bahwa ini merupakan formulasi desain yang paling cantik yang pernah saya baca. Sementara memang Musrenbang itu bertujuan untuk menampung keinginan dan kemauan dan aspirasi yang bersumber dari bawah (*button up*) yang

pada gilirannya membuatkan hasil perencanaan untuk kurun waktu tertentu. Kalau untuk satu tahun dapat melahirkan sebuah program jangka pendek yang disebut RKPD, maka untuk kurun waktu lima tahun disebut dengan RPJMD. Adapun yang disebut RPJPD merupakan perencanaan dalam kurun waktu 20 tahun. Sekali lagi saya katakan dan tandaskan bahwa Musrenbang berbasis kultural seperti ini adalah tidak hanya mencerminkan aspirasi masyarakat, tetapi juga aspirasi tersebut akan menjadi amanah yang membuat aparat pemerintah merasa cemas jika terabaikan (Dr. Eka Paksi, wawancara 12 Juli 2019).

## KESIMPULAN

Dominasi pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa sebagai dana pembangunan dan dana kemanusiaan dalam konteks raga (fisik) dibanding non raga (non fisik), maka pada dasarnya adalah menyerahkan kebebasan kepada sang aktor dan aktris serta penyelenggara pengelola biaya pembangunan desa untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak wajar berupa penggelembungan bayaran (*mark up*) serta berbagai wujud sikap penyimpangan lainnya. Akibatnya, dapat membuatkan kecurigaan dan persepsi negatif serta buruk sangka di benak warga.

Proses penyelenggaraan Musrenbang adalah selain cenderung berlangsung secara formalistik dengan maksud untuk menggugurkan aspek proceduralnya, juga proses komunikasi yang berlangsung di dalam forum Musrenbang adalah cenderung tidak seimbang atau didominasi oleh pihak pemerintahan. Artinya, proses komunikasi rasional dimaksud Habermas cenderung tidak berlangsung sebagaimana mestinya atau seharusnya. Sementara pranata *kalosara* yang masih sakral bagi warga komunitas Tolaki serta Mekongga di daerah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara, nampak

masih terus terletak di ranah ritualistik. Artinya, hingga saat ini *kalosara* belum dimanfaatkan dalam konteks pembangunan daerah, tertutama dalam konteks pembangunan wilayah perdesaan.

Akhirnya, maka upaya memfungsikan nilai dan norma *kalosara* ke ruang perencanaan pembangunan wilayah perdesaan, maka di akhir tulisan ini menawarkan suatu diskursus perumusan penyelenggaraan Musrenbang secara khas kultural di tingkatan *Onapo/Okambo* di daerah pedesaan, *Otobu/Puu’tobu* di daerah kecamatan serta *Sapati* di tingkatan kabupaten-kota dan *Mokole* ataupun *Sangia* pada tingkatan Provinsi. Hasil perumusan tersebut adalah tidak hanya merupakan proses sintetis yang bernuansa simbolistik, namun bisa menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam rangka membangkitkan energi partisipatif serta energi keswadayaan warga di tengah kehidupan komunitas Tolaki/Mekongga Provinsi Sulawesi Tenggara.

## SARAN

Ikhwal terpenting disarankan dalam tulisan ini bahwa sebaiknya mulai saat ini warga masyarakat yang menempati atau menghuni wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara agar mulai mencoba menggunakan formulasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai hasil rancangan sintetis antara paradigma pembangunan konvensional dengan paradigma pembangunan moderen. Betapa kita yakini dan sangat percaya bahwa *kalosara* yang sangat sakral pada pemikiran dan penghayatan batin bagi warga komunitas Tolaki/ Mekongga, dapat menjadi pengendali diri dan pengendalian sosial serta menjadi kekuatan penggerak (*driving force*) dalam menyelenggarakan serta melangsungkan kehidupan sosialnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitri. (2011). *Community development: teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Collier I. W. dkk. (1996). Pendekatan baru dalam pembangunan pedesaan: kajian pedesaan selama dua puluh lima tahun. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Coleman, J. S. (2011). Social capital in the creation of human capital: *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.
- Friedman. (1992). Empowerment, the politics of alternative development. Cambridge and Oxford: Blackwell.
- Fukuyama, F. (2007). Trust: the social virtues and the creation of prosperity. New York: The Free Press
- Hakim, G. (2017). Hukum adat kalosara. Kendari: Barokah Raya.
- Koodoh, E. E. (2011). Hukum adat orang Tolaki. Yogyakarta: Teras.
- Lawang, R. M. Z. (2005). Kapital sosial dalam perspektif sosiologi. Depok: FISIP UI Press.
- Liliweri, A. (2003). Makna budaya dalam komunikasi antar budaya. Yogyakarta: LKIS.
- Manners, A. R. & Kaplan, D. (2002). Teori budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles, B. M. & Huberman, M. A. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: UI-Press.
- Muhadjir, Noeng, (2011). Metodologi penelitian: paradigma positivisme objektif, fenomenologi interpretatif logika bahasa platonis, chomskyist, hegelian dan hermeneutik, paradigma studi Islam, matematik recursion-set theory & struktural equation modeling dan mixed. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pakpahan, A. (1989). Kerangka analitik untuk penelitian rekayasa sosial: perspektif ekonomi institusi. *Prosi-* ding Patanas: Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Bogor: Pusat Penelitian Agro Ekonomi.
- Peribadi. (2013). Fenomena eksplorasi agraris oleh kaum kapital domestik: sebuah studi kasus di wilayah perkebunan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 2(2), 2013. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v2i2.44>
- Peribadi, et. al. (2016). *Institutional and Capacity Building Rural Social Institutions*, International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Vol. 3 Issue 2, February 2016. India: IJISET.
- Peribadi, et al. (2019). Konstruksi perencanaan participatory berbasis budaya *kalosara*: sebuah perspektif sosiologi pembangunan. Yogyakarta: Deepublish (Anggota IKAPI).
- Peribadi, et al. (2021). Strategi community development berbasis *kalosara*, sebuah tinjauan teoritis dan praktikal, *Edisi Revisi*. Sumatera Barat: Mitra Cendikia Media.
- Peribadi. (2021). Post qualitatif dan riset pembebasan. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Putnam, R. D. (1995). “Bowling alone: America’s declining social capital. *Journal of Demokrasi*, 65-78.
- Poerwanto, R. (2008). Membangun pertanian masa depan: meraih keunggulan pertanian Indonesia, dalam *Pemikiran Guru Besar Institut Pertanian Bogor: Perspektif Ilmu-ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional*. Bogor: Penerbit Swadaya.
- Syahyuti. (2002). Penelitian kelembagaan dan organisasi pertanian: konsep, metodologi, dan acuan

- kerja. <https://kelembagaandas.wordpress.com/penelitian-kelembagaan/syahyuti-2/>. Diakses tanggal 11 September 2019 pada pukul 19.30 WIT
- Steward, H. J. (1950). Area research, theory and practice. *Social Science Research Council*. New York 17: 230 Park Avenue.
- Sugandhi, A. (2008). Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis, PMU/Proyek, P2KP. [www.p2kp.org/pustaka](http://www.p2kp.org/pustaka).
- Tamburaka, B. (2016). Memahami *kalosara* secara mudah. Kendari: Barokah Raya.
- Tarimana, A. (1998). Kebudayaan Tolaki. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiradi, G. (2000). Reforma agraria: perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar.
- Wolf, R. E. (1983). Petani, suatu tinjauan antropologi. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yin, R. K. (2008). Studi kasus: desain dan metode. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.